

STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN GARUT

POVERTY REDUCTION STRATEGY THROUGH CREATING EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR IN GARUT DISTRICT

Facia Puspa Hazita, Dani Nugraha, Devi Rizka Karina, Erwin Aditya Saputra, Muhamad Hafiz Zuldi, Ria Yessi Gartika, Royani Wulandari, dan Bayu Kharisma
Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran
facia.h@pu.go.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to develop recommendations for strategies that can be implemented by the Garut Regency Government for poverty alleviation through investment in the tourism sector to expand employment opportunities. The research methods used are Location Quotient Analysis (LQ), Shift-Share Analysis (SSA), Klassen Typology to determine regional economic conditions in the tourism sector, ICOR analysis and Elasticity of employment opportunities to determine the level of investment efficiency and estimated employment and Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis. The results of the analysis study concluded that the tourism sector is a base sector and a prime sector that needs to be encouraged to increase economic growth and reduce unemployment in Garut Regency. This is strengthened by the elasticity of employment opportunities where the tourism sector has a considerable contribution in absorbing the labor force. Job creation in the tourism sector can be accelerated from the support of investment in the tourism sector. To increase investment, the Garut Regency Government needs to create a conducive investment climate, because there are still indications of inefficiency from the use of Garut Regency capital. With this investment in the tourism sector, it is hoped that it can open up job opportunities that absorb the labor force, so as to increase people's income which will have implications for decreasing the poverty rate in Garut Regency. Keywords: Poverty, Unemployment, Tourism Sector Investment, Job Creation.

Keywords: Poverty, Unemployment, Tourism Sector Investment, Job Creation

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi strategi yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk pengentasan kemiskinan melalui investasi di sektor pariwisata guna memperluas kesempatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share Analysis* (SSA), Tipologi Klassen untuk mengetahui kondisi ekonomi regional sektor pariwisata, analisis ICOR dan Elastisitas Kesempatan kerja untuk mengetahui tingkat efisiensi investasi dan estimasi penyerapan tenaga kerja dan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT). Hasil penelitian analisis menyimpulkan sektor pariwisata merupakan sektor basis dan sektor prima yang perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Garut. Hal ini diperkuat dengan elastisitas kesempatan kerja dimana sektor pariwisata mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyerap angkatan kerja. Penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata dapat dipercepat dari dukungan investasi di sektor pariwisata. Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Kabupaten Garut perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, dikarenakan masih adanya indikasi inefisiensi dari penggunaan kapital Kabupaten Garut. Dengan adanya investasi di sektor pariwisata tersebut, diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang menyerap angkatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi pada menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Investasi Sektor Pariwisata, Penciptaan Lapangan Kerja

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan

masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Todaro & Smith, (2011) menyebutkan bahwa kemiskinan yang semakin meluas serta angka yang tinggi merupakan inti dari semua masalah

pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Ahmed Chowdhury & Somani, 2020). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya. Kemiskinan menjadi permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tatanan nasional dan juga tatanan daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota yang lebih spesifik sesuai dengan kewajiban pemerintah berupa pengaturan (*regulation*) dan pelayanan (*service*).

Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah harus mampu memberdayakan masyarakat (*empowering*) serta memberikan pelayanan (*service*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan yang mendapat perhatian khusus pemerintah saat ini (TNP2K, 2021), dimana pemerintah sendiri telah menetapkan program pengurangan kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dan 35 kabupaten prioritas yang diinisiasi oleh TNP2K untuk pengentasan *extreme poverty* 2024 dan *no poverty* pada tujuan pertama pembangunan berkelanjutan

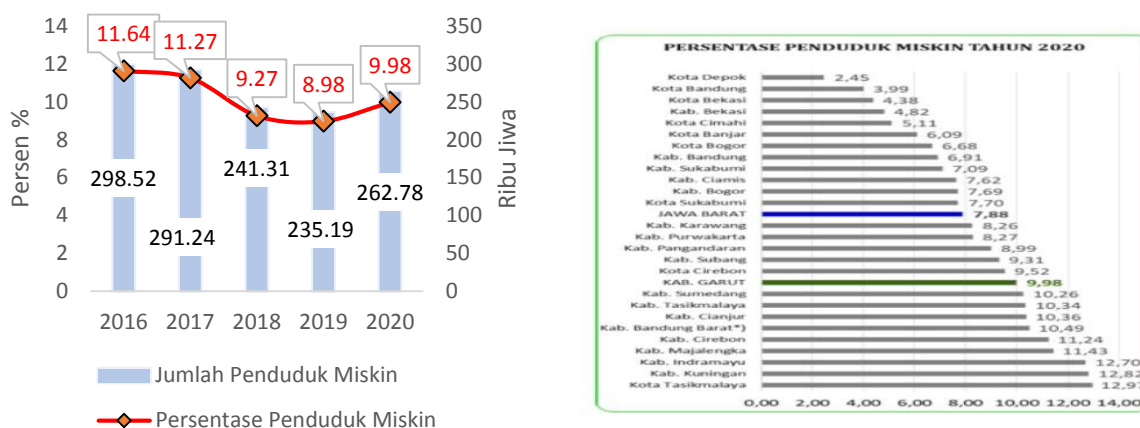
(SDGs) 2030. kemiskinan sendiri akan mempunyai dampak yang serius apabila tidak terkendali, seperti penurunan kualitas SDM dimasa mendatang, tingginya angka kriminalitas dan tentunya banyak anggaran pemerintah yang akan dialokasikan untuk isu kemiskinan ini sehingga sektor sektor lain terganggu sehingga kemiskinan ini penting sekali untuk dapat dikendalikan.

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan utama. Beberapa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut dibentuk demi mengurangi jumlah tingkat kemiskinan. Namun, penanggulangan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Menurut dari hasil pendataan BPS tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 27,59 ribu jiwa, dari 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 262,78 ribu jiwa (9,98 %) pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 1%. Selama periode 2016-2020, persentase penduduk miskin menurun 1,66%, dimana sebagai pembandingan data kemiskinan di provinsi jawa barat berkisar 7,88 % pada tahun 2020 dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 410 988 ribu seperti terlihat dari Tabel 1 dan Grafik 1 berikut:

Tabel 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Garut 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	256.770	267.252	282.683	301.202	310.437
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	298,52	291,24	241,31	235,19	262,78
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11,64	11,27	9,27	8,98	9,98
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,79	1,72	1,49	0,87	0,97
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,43	0,37	0,16	0,15

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD



Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut 2016-2020

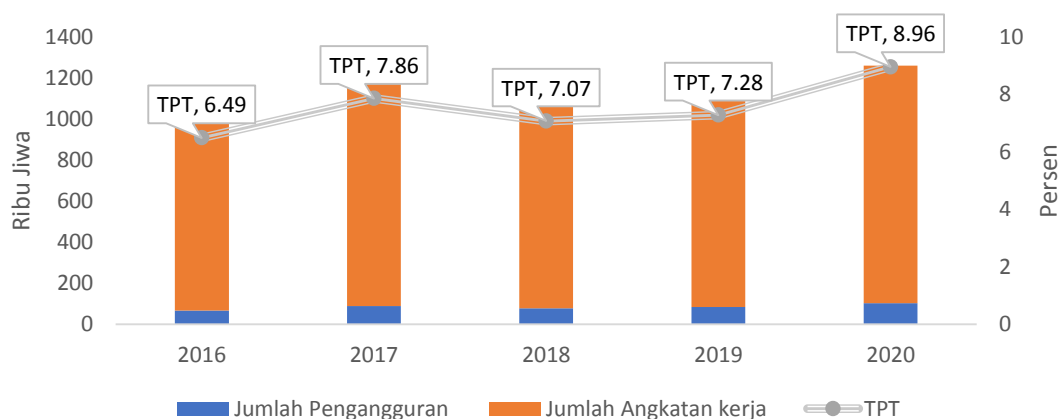
Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

Pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut sendiri pada Tahun 2020 mengalami peningkatan Rp.9.235,- per kapita per bulan atau sebesar 3,07% dari Rp. 301.202,- per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 310.437,- per kapita per bulan pada tahun 2020. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2016-2020, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin adalah membuka lapangan kerja seluas luasnya, sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran dapat berkurang dan kemiskinan semakin menurun. Ketika masyarakat tidak menganggur, artinya masyarakat telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut telah berada di atas garis kemiskinan. Sehingga apabila tingkat pengangguran rendah, maka tingkat kemiskinan

juga rendah. Hal ini dikarenakan dengan adanya kesempatan kerja yang tinggi.

Pengangguran ini menjadi salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik, 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Garut pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, mencapai 103,607 jiwa atau 8,96 % naik 1,68 % atau (19,562 ribu jiwa) dari Tahun 2019 sebanyak 84,045 jiwa atau 7,28%. Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Garut

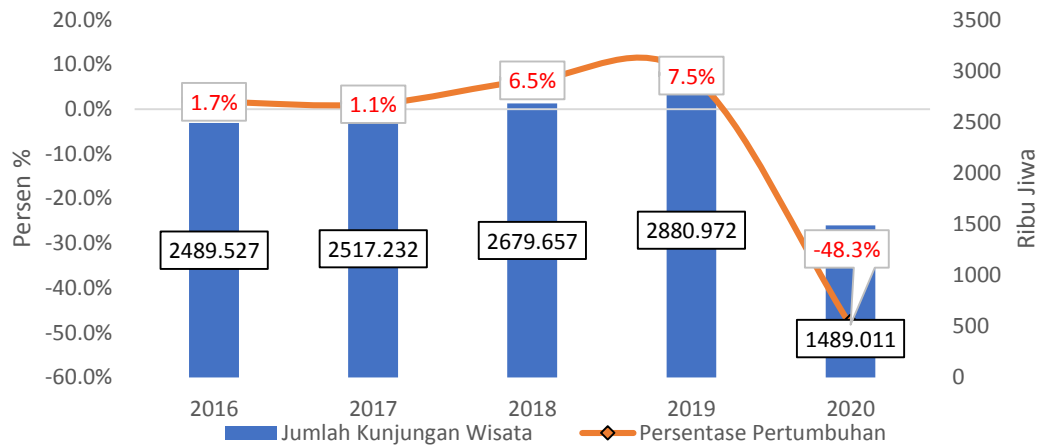
Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pemberdayaan dan pengembangan kualitas masyarakat sebagai perwujudan *human capital* diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja ini dapat terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut yang dapat diwujudkan melalui aktivitas investasi.

Investasi dapat menjadi salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan, sebab tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh manfaat yang layak di kemudian hari. Apabila kegiatan investasi meningkat, maka kegiatan ekonomi pun ikut meningkat. Investasi menjadi salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Capaian perkembangan realisasi Investasi yang ada di Kabupaten Garut mengalami penurunan investasi, pada tahun

2020 realisasi investasi di Kabupaten Garut sebesar Rp.1.113.847.290.239,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar (-18,75%) dari tahun 2019 sebesar Rp.1.370.844.292.495,00. Hal ini tentu perlu dilakukan adanya perbaikan iklim investasi agar nilai investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, salah satu diantaranya adalah sektor pariwisata.

Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat (Muhammad, Mutiarin, & Damanik, 2021), khususnya masyarakat Kabupaten Garut. Pemerintah Garut meyakini bahwa sektor pariwisata mempunyai potensi besar untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pemerintah Garut sendiri telah berkomitmen dengan hal tersebut yang dibuktikan dengan adanya SK 53 Desa wisata di Kabupaten Garut, Berdasarkan hasil data perhitungan BPS, tercatat dalam waktu 5 tahun terakhir (2015-2020), jumlah wisatawan Kabupaten Garut terus meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat kondisi pandemi Covid-19.



Gambar 3. Perkembangan Kunjungan Wisata Kabupaten Garut

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat terasa di Kabupaten Garut, terlihat dari kunjungan wisatawan yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga -48,3 % di tahun 2020. Hal inilah yang menyebabkan perlunya kebijakan maupun adanya intervensi guna memulihkan kembali geliat pariwisata Kabupaten Garut yang sempat redup akibat adanya pembatasan aktivitas pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dan ditutupnya destinasi wisata (PPKM) demi memutus rantai penularan Covid-19. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap penjelasan konseptual keterkaitan antara kebijakan pengembangan investasi di sektor pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti keterkaitan antara kebijakan pengembangan investasi di sektor pariwisata dalam membuka lapangan pekerjaan guna mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan dan ingin mengetahui serta melihat langsung secara mendalam bagaimana dampak investasi bidang pariwisata di Kabupaten Garut dalam mengurangi kemiskinan serta alternatif strategi apa saja yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Garut untuk menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata di masa depan.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini kami menggunakan Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen - dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Sumber Data Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1	Rancangan Akhir RPJMD Kab. Garut	Bappeda Kab. Garut
2	SK Desa Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Garut	DPMPTSP Kab. Garut
4	Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kab. Garut	BPS Kab. Garut
5	PDRB Kabupaten Menurut Lapangan Usaha	BPS Kab. Garut
6	Kabupaten Garut dalam Angka	BPS Kab. Garut
7	Naskah Akademik RTRW Kab. Garut (Analisis terkait Ekonomi)	Pemda Kab. Garut
8	Provinsi Jawa Barat dalam Angka	BPS Provinsi Jawa Barat
9	Meta Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi	Bappenas
10	Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program Pilar 2: Peningkatan Pendapatan	TNP2K

Dalam penelitian ini data - data tersebut dikumpulkan melalui instansi - instansi terkait seperti: Bappeda, Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini, berupa alat tulis, kertas, dan komputer.

Pada dasarnya analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang ada akan dianalisis ke bentuk yang lebih sederhana untuk selanjutnya dicari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian (Wardiyanta dalam Samaji, 2015:38).

• Metode Location Quotient (LQ)

LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah suatu sektor di suatu daerah (kabupaten atau kota) terhadap sumbangan nilai tambah suatu sektor pada skala yang lebih luas (Bendavid-Val, 1989). Dengan kata lain, LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor basis atau *leading sector* dengan menghitung perbandingan share output sektor i di daerah analisis k dan *share output* sektor i di daerah referensi p. Berikut adalah formulasi perhitungan LQ.

$$LQ = \frac{Sik/PDRBk}{Sip/PDRBP}$$

Keterangan:

Sik = Sumbangan sektor i daerah analisis k dalam

pembentukan PDRB daerah

analisis k

PDRBK = PDRB total semua sektor di daerah analisis

k

Sip = Sumbangan sektor i daerah referensi p

dalam pembentukan PDRB daerah

acuan p

PDRBP = PDRB total semua sektor daerah referensi p

Nilai LQ yang mungkin dihasilkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan, sebagai berikut:

- LQ bernilai ≥ 1 , artinya sektor ekonomi di daerah analisis k memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan perekonomian daerah referensi p pada sektor yang sama. Sektor tersebut menjadi basis atau memiliki keunggulan komparatif. Komoditas di sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri, tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

- b. LQ bernilai < 1, artinya sektor ekonomi di daerah analisis memiliki laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan perekonomian daerah referensi p pada sektor yang sama. Sehingga, sektor ekonomi tersebut tidak termasuk dalam sektor unggulan daerah studi sekaligus tidak termasuk dalam golongan basis dan tidak prospektif untuk lebih ditingkatkan oleh daerah analisis. Sektor tersebut tergolong non basis. Komoditas di sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri.

• **Metode Shift-Share Analysis (SSA)**

Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah (Bendavid-Val, 1989). Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah analisis k, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi daerah referensi p. Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen:

1. National Share, namun dalam hal ini yang lebih tepat adalah Provincial/Regional Share, merupakan Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu untuk mengukur kinerja pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian daerah analisis k terhadap daerah referensi p.
2. Proportional (Industry-Mix) Shift, merupakan Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu untuk mengukur perubahan (pertumbuhan/penurunan) pada daerah analisis k dengan pertumbuhan agregat daerah referensi p. Apabila komponen ini bernilai positif, maka perekonomian daerah analisis k terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian daerah referensi p, begitupun sebaliknya.
3. Differential Shift, merupakan Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu untuk mengukur kinerja sektor daerah analisis k terhadap sektor yang sama pada perekonomian daerah referensi p. Apabila komponen ini bernilai positif, maka daya saing

sektor daerah analisis k meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi daerah referensi p, begitu pun sebaliknya.

Dengan demikian, apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi suatu daerah analisis k adalah PEK, maka persamaannya dapat diformulasikan, sebagai berikut:

$$PEK = KPW + KPP + KPK$$

$$PEK = \left[\frac{Y^*}{Y} - 1 \right] + \left[\frac{Y_{i1} Y^*}{Y_{i1} Y} \right] + \left[\frac{y_{i1} Y_{i1}}{y_{i1} Y_{i1}} \right]$$

Keterangan:

Nett Share = Perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi (PEK)

Proportional Share = Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)

Differential Share = Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK)

Y* = Indikator ekonomi daerah referensi p akhir tahun kajian

Y = Indikator ekonomi daerah referensi p awal tahun kajian

Y_i = Indikator ekonomi daerah referensi p sektor i akhir tahun kajian

Y_i = Indikator ekonomi daerah referensi p sektor i awal tahun kajian

y_i = Indikator ekonomi daerah analisis k sektor i akhir tahun kajian

y_i = Indikator ekonomi daerah analisis k sektor i awal tahun kajian

• **Tipologi Klassen**

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah analisis k terhadap daerah referensi p, yang pembagiannya didasarkan pada dua indikator utama, yaitu proporsi pendapatan per kapita daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor menjadi empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda, sebagai berikut (Munandar, Azhari, Musdholifah, & Arsyad, 2018).

1. Prima (Kuadran I), dimana sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB daerah analisis k (Rik) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah referensi p (Rip) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah analisis k (Pik) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi p (Pip). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan Rik lebih besar dari Rip dan Pik lebih besar dari Pip.
2. Potensial (Kuadran II), dimana sektor maju tapi tertekan. Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB daerah analisis k (Rik) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah referensi p (Rip), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah analisis k (Pik) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah referensi p (Pip).
3. Berkembang (Kuadran III), dimana sektor masih dapat berkembang dengan pesat. Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB daerah analisis k (Rik) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi p (Rip), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah analisis k (Pik) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah referensi p (Pip).
4. Relatif Tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB daerah analisis k (Rik) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah referensi p (Rip) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB daerah analisis k (Pik) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi p (Pip).

- **Elastisitas Kesempatan Kerja**

Untuk mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja akibat adanya pertumbuhan ekonomi, maka metode perhitungan yang digunakan adalah dengan membandingkan perkembangan kesempatan kerja dengan

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun yang sama. Elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar kesempatan kerja yang tercipta sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, baik secara totalitas maupun secara pertumbuhan sektoral (Berardi & Marzo, 2017). Elastisitas diterapkan dalam perhitungan-perhitungan ekonomi sebagai bahan pertimbangan baik bagi perusahaan untuk mentukan proyeksi produksi sehingga dapat meningkatkan penjualannya, atau pemerintah yang menggunakan elastisitas sebagai alat menentukan suatu kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan (Biswas & Singh, 2020). Selain itu elastisitas dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu periode melalui elastisitas kesempatan kerja (mirdad & Akhbar, 2018).

- **Analisis ICOR**

Secara umum Kapital atau yang sering disebut sebagai "*Gross Capital Stock*" merupakan akumulasi atau penumpukan pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produk baru. Kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan lainnya. Dalam sistem pembukuan neraca perusahaan, yang dimaksud dengan kapital adalah harta tetap (*fixed assets*) suatu badan usaha. Sementara itu menurut konsep ekonomi nasional yang mengacu pada *A System of Nation Account* (UN, 1968; Taguchi & Lowhachai, 2014)) investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun (t) dikurangi dengan stok kapital pada tahun (t-1). Sehingga setiap terjadi penambahan atau penimbunan kapital (modal) selalu dianggap sebagai investasi. Oleh karena itu besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan pada suatu tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembuatan dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri.

- **Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini untuk mengetahui

bagaimana rekomendasi strategi yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada sektor pariwisata dalam jangka panjang. Dalam membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (*weakness*) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang (*opportunity*) yang terbuka serta dapat mengetahui pula ancaman (*Threath*) yang dialami oleh Kabupaten Garut.

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT (Phadermrod, Crowder, & Wills, 2019), yaitu :

- Faktor eksternal ini dipengaruhi *opportunities and threats* (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar Kabupaten Garut yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industry, lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik,

hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

- Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths and weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam Kabupaten Garut, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*). Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Garut

Penentuan sektor basis dan non basis Kabupaten Garut menggunakan perhitungan LQ dengan menggunakan PDRB ADHK tahun 2015 hingga 2020 Kabupaten Garut dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun yang sama Provinsi Jawa Barat. Hasil perhitungan LQ dapat dilihat berdasarkan Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan LQ Sektoral Kabupaten Garut (2015-2020)

No	Lapangan Usaha	Kabupaten Garut							Status
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,56	4,50	4,55	4,59	4,53	4,40	4,52	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	1,20	1,21	1,21	1,22	1,26	1,29	1,23	Basis
C	Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,19	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,15	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	0,61	0,63	Non Basis
F	Konstruksi	0,75	0,77	0,77	0,78	0,79	0,78	0,77	Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,35	1,36	1,37	1,40	1,39	1,39	1,38	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,42	1,39	1,40	1,42	1,47	1,49	1,43	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,76	0,75	0,75	0,76	0,72	0,65	0,73	Non Basis

No	Lapangan Usaha	Kabupaten Garut							Status
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,13	1,10	1,11	1,12	1,16	1,14	1,13	Basis
L	Real Estat	1,54	1,54	1,54	1,55	1,55	1,50	1,54	Basis
M, N	Jasa Perusahaan	1,29	1,30	1,31	1,35	1,33	1,40	1,33	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,67	1,66	1,59	1,61	1,57	1,64	1,62	Basis
P	Jasa Pendidikan	1,69	1,68	1,72	1,73	1,77	1,72	1,72	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,96	1,00	1,01	0,99	0,98	0,98	Non Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,61	1,61	1,68	1,69	1,68	1,66	1,66	Basis

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Pada hasil analisis, dapat diketahui bahwa 10 sektor menurut lapangan usaha di Kabupaten Garut yang memiliki sektor basis (skor LQ ≥ 1), termasuk sektor perdagangan (1,38) dan penyediaan akomodasi makan dan minum (1,43). Dengan kata lain sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sektor serupa di tingkat Provinsi Jawa Barat. Sementara, sektor transportasi merupakan sektor non basis (0,81) yang belum memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

- **Identifikasi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi Kabupaten Garut**

Identifikasi perubahan dan pertumbuhan kinerja ekonomi Kabupaten Garut menggunakan analisis *Shift-Share* dengan menghitung Perubahan atau Pertumbuhan Kinerja Ekonomi (PEK) Kabupaten Garut

dengan melihat masing-masing komponen yang menentukan pergeseran pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah, diantaranya: Komponen pertumbuhan wilayah acuan (KPW), yaitu *national share* (dalam hal ini *regional/ provincial share*). Komponen pertumbuhan proporsional (KPP), yaitu *proportional shift*. Apabila komponen KPP bernilai positif, maka sektor tertentu Kabupaten Garut tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Komponen pergeseran atau pertumbuhan pangsa wilayah (KPK), yaitu *differential shift*. Apabila komponen KPK bernilai positif, maka sektor tertentu Kabupaten Garut tersebut meningkat daya saingnya dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Hasil perhitungan dari masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Shift-Share Sektoral Kabupaten Garut (2015-2020)

No	Lapangan Usaha	National Share (KPW)	Proportional Shift (KPP)	Differential Shift (KPK)	PEK	Kinerja PEK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	462,98	-115,28	-82,81	264,89	+
B	Pertambangan dan Penggalian	32,38	-55,85	12,03	-11,44	-
C	Industri Pengolahan	114,48	-16,95	92,83	190,37	+
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	-1,59	1,42	0,68	+
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,71	0,48	-0,08	1,10	+
F	Konstruksi	89,03	2,90	19,19	111,12	+
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	294,68	-100,29	47,10	241,49	+
H	Transportasi dan Pergudangan	53,19	1,47	3,76	58,43	+
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52,38	22,36	14,02	88,75	+
J	Informasi dan Komunikasi	42,97	133,54	-39,68	136,84	+

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,34	8,07	2,72	50,13	+
L	Real Estat	26,41	24,12	-3,34	47,20	+
M, N	Jasa Perusahaan	7,85	-1,33	2,98	9,49	+
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44,17	-27,58	-3,65	12,94	+
P	Jasa Pendidikan	67,78	51,29	7,13	126,20	+
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,80	5,92	1,89	18,61	+
R, S, T, U	Jasa lainnya	49,16	26,58	9,75	85,49	+
Total		1389,17	-42,14	85,26	1432,29	+

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Kinerja positif pada Proportional Shift (KPP) menandakan bahwa sektor di Kabupaten Garut lebih cepat tumbuh dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat, sementara kinerja positif pada Differential Shift (KPP) menandakan bahwa sektor tersebut meningkat daya saingnya dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat.

Dilihat dari nilai PEK, secara umum seluruh sektor (termasuk ketiga sektor pendukung pariwisata) memiliki pertumbuhan kinerja yang positif (kinerja +), kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sektor transportasi dan perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum termasuk sektor yang tumbuh lebih cepat dan meningkat daya saingnya dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Sementara

itu, perdagangan nampaknya belum tumbuh lebih cepat meskipun daya saingnya meningkat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

- **Identifikasi gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut**

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut, yang pembagiannya didasarkan pada dua indikator utama, yaitu proporsi pendapatan per kapita daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil perhitungan penentuan tipologi daerah, sebagaimana tersaji pada Tabel 5.

Tabel. 5 Hasil Perhitungan Penentuan Tipologi Daerah (Tipologi Klassen)

No	Lapangan Usaha	Proportion			Rate		Status	
		PiKab	PiProv	Kontribusi	RiKab	RiProv		Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,3341	0,0739	Besar	0,0221	0,0290	Lambat	Berkembang
B	Pertambangan dan Penggalian	0,0235	0,0191	Besar	-	-0,0280	Cepat	Prima
C	Industri Pengolahan	0,0822	0,4304	Kecil	0,0641	0,0329	Cepat	Potensial
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0006	0,0041	Kecil	0,0310	0,0337	Cepat	Potensial
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0005	0,0008	Kecil	0,0600	0,0645	Lambat	Relatif Tertinggal
F	Konstruksi	0,0640	0,0827	Kecil	0,0481	0,0398	Cepat	Potensial
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,2122	0,1541	Besar	0,0316	0,0254	Cepat	Prima
H	Transportasi dan Pergudangan	0,0383	0,0474	Kecil	0,0424	0,0396	Cepat	Potensial

No	Lapangan Usaha	Proportion			Rate			Status
		PiKab	PiProv	Kontribusi	RiKab	RiProv	Pertumbuhan	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0376	0,0262	Besar	0,0654	0,0550	Cepat	Prima
J	Informasi dan Komunikasi	0,0307	0,0425	Kecil	0,1228	0,1584	Lambat	Relatif Tertinggal
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0283	0,0251	Besar	0,0491	0,0465	Cepat	Prima
L	Real Estat	0,0189	0,0123	Besar	0,0689	0,0738	Lambat	Berkembang
M, N	Jasa Perusahaan	0,0056	0,0042	Besar	0,0466	0,0320	Cepat	Prima
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0319	0,0196	Besar	0,0113	0,0145	Lambat	Berkembang
P	Jasa Pendidikan	0,0486	0,0283	Besar	0,0718	0,0678	Cepat	Prima
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0077	0,0079	Kecil	0,0665	0,0597	Cepat	Potensial
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,0353	0,0213	Besar	0,0671	0,0594	Cepat	Prima

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 6. Kuadran Tipologi Klassen

Kuadran	Status	Keterangan	Sektor
I	Prima	Komoditas unggulan/prioitas suatu daerah cepat maju dan cepat tumbuh	B, G, I K, MN, P, RSTU
II	Potensial	Komoditas unggulan atau prioritas suatu daerah maju tapi tertekan	C, D, F, H, Q
III	Berkembang	Komoditas unggulan atau prioritas suatu daerah	A, L, O
IV	Relatif Tertinggal	Komoditas unggulan atau prioritas suatu daerah relatif tertinggal	E, J

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sektor perdagangan dan penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Garut merupakan sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh, yang berarti memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat, sementara sektor transportasi Kabupaten Garut merupakan sektor maju namun tertekan yang berarti memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat.

• Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Kabupaten Garut

Kegiatan ekonomi penduduk yang bekerja tercermin dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan jumlah seluruh nilai tambah (produk yang ditimbulkan dari berbagai lapangan usaha penduduk). Perkembangan PDRB Kabupaten Garut tahun 2015-2020 atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.197.706,63	11.705.834,63	11.977.731,10	12.242.474,00	12.414.995,00	12.483.739,00
Pertambangan dan Penggalian	869.927,68	870.461,93	850.791,75	816.357,90	817.334,26	811.711,00
Industri Pengolahan	2.475.801,35	2.655.404,69	2.820.544,60	3.106.252,49	3.383.587,45	3.367.915,00
Pengadaan Listrik dan Gas	19.954,29	21.130,60	21.671,91	22.527,80	23.495,05	23.212,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.767,11	16.720,44	17.909,91	18.838,70	19.823,76	21.096,00
Konstruksi	1.966.007,24	2.107.164,42	2.258.649,47	2.429.177,10	2.617.084,39	2.470.953,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.810.509,69	7.183.458,71	7.530.250,33	7.930.489,15	8.478.340,22	7.908.332,00
Transportasi dan Pergudangan	1.193.942,17	1.297.777,01	1.367.291,80	1.439.961,90	1.512.342,31	1.463.742,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.117.525,43	1.202.357,45	1.305.833,02	1.423.830,50	1.573.304,42	1.525.256,00
Informasi dan Komunikasi	837.335,35	945.017,68	1.056.812,15	1.158.794,90	1.204.150,42	1.482.959,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	879.801,51	960.172,09	1.000.229,33	1.052.733,50	1.111.069,85	1.116.359,00
Real Estat	564.171,70	599.600,62	654.825,84	719.587,90	786.043,55	784.842,00
Jasa Perusahaan	168.583,26	183.434,28	199.659,32	222.746,50	239.564,50	207.352,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.102.599,31	1.129.284,21	1.131.393,97	1.156.083,00	1.186.165,14	1.165.485,00
Jasa Pendidikan	1.448.370,10	1.556.704,96	1.720.021,17	1.821.502,10	1.950.600,08	2.047.079,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224.581,57	247.388,44	277.647,08	299.719,70	323.645,86	307.177,00
Jasa lainnya	1.026.474,16	1.121.627,22	1.273.649,39	1.364.078,30	1.450.945,86	1.410.936,00
TOTAL	31.919.058,55	33.803.539,38	35.464.912,14	37.224.454,94	39.092.646,89	38.598.145,00

Sumber:

*Produk Domestik Regional Kabupaten Garut Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

**BPS Kabupaten Garut

Laju pertumbuhan PDRB merupakan wilayah perekonomian dalam selang waktu pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu tertentu.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2015	4,51
2016	5,90
2017	4,91
2018	4,96
2019	5,02
2020	-1,26

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Elastisitas kesempatan kerja merupakan angka yang menunjukkan tingkat hubungan fungsional antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka tingkat elastisitas kesempatan kerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja Kabupaten Garut

Tahun	LP PDRB (%)	LP Kesempatan Kerja (%)	Elastisitas Kesempatan Kerja
2015	4,51	0,01	0,224
2016	5,90	0,01	0,185
2017	4,91	0,10	2,202
2018	4,96	-0,03	-0,663
2019	5,02	0,05	1,074
2020	-1,26	0,001	-0,076

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

• **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata Kabupaten Garut**

Kontribusi PDRB sektor pariwisata terdiri tiga jenis lapangan usaha antara lain

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang dihitung atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.810.509,69	7.183.458,71	7.530.250,33	7.930.489,15	8.478.340,22	7.908.332,00
Transportasi dan Pergudangan	1.193.942,17	1.297.777,01	1.367.291,80	1.439.961,90	1.512.342,31	1.463.742,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.117.525,43	1.202.357,45	1.305.833,02	1.423.830,50	1.573.304,42	1.525.256,00
Total PDRB Sektor Pariwisata	9.121.977,29	9.683.593,17	10.203.375,15	10.794.281,55	11.563.986,95	10.897.330,00

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata merupakan persentase perbandingan jumlah PDRB sektor pariwisata tahun berjalan dengan jumlah PDRB sektor pariwisata tahun sebelumnya.

Tabel 11 Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Garut

Tahun	LP PDRB sektor pariwisata (%)
2015	5,54
2016	6,16
2017	5,37
2018	5,79
2019	7,13
2020	-5,76

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Share PDRB sektor pariwisata merupakan besarnya kontribusi PDRB sektor pariwisata dari tiga jenis lapangan usaha terhadap jumlah keseluruhan PDRB dari seluruh jenis lapangan usaha pada tahun yang sama.

Tabel 12. Share PDRB Sektor Pariwisata

Tahun	Share PDRB sektor pariwisata (%)
2015	28,58
2016	28,65
2017	28,77
2018	29,00
2019	29,58
2020	28,23

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan perbandingan antara kontribusi sektor pariwisata dengan pertumbuhan PDRB pada tahun yang sama.

Tabel 13. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut

Tahun	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB (%)
2015	35,11
2016	29,87
2017	31,42
2018	33,85
2019	42,03
2020	128,67

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Tabel 14. Pertambahan Angkatan Kerja di Kabupaten Garut

Tahun	Angkatan Kerja	Pertambahan Angkatan Kerja
2015	1.011.529	10.115
2016	1.022.569	11.040
2017	1.133.248	110.679
2018	1.095.981	-37.267
2019	1.155.071	59.090
2020	1.156.180	1.109

Sumber: RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024

- **Asumsi Penyerapan Angkatan Kerja di Sektor Pariwisata**

Angkatan kerja yang tercipta dari sektor pariwisata merupakan asumsi jumlah penyerapan angkatan kerja atas adanya kontribusi sektor pariwisata terhadap

pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut. Penyerapan angkatan kerja terhadap 1% pertumbuhan PDRB sektor pariwisata merupakan jumlah angkatan kerja yang tercipta dari sektor pariwisata atas adanya pertumbuhan PDRB sektor pariwisata sebesar 1%.

Tabel 15. Asumsi Penyerapan Angkatan Kerja di Sektor Pariwisata

Tahun	Jumlah Penambahan Angkatan Kerja	LP PDRB sektor pariwisata (%)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB (%)	Jumlah angkatan kerja yang tercipta dari sektor pariwisata	Penyerapan angkatan kerja terhadap 1% pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
2015	10.115	5,54	35,11	3.551	641
2016	11.040	6,16	29,87	3.298	536
2017	110.679	5,37	31,42	34.777	6.479
2018	-37.267	5,79	33,85	-12.614	(2.178)
2019	59.090	7,13	42,03	24.835	3.483
2020	1.109	-5,76	128,67	1.427	(248)

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Dilihat dari kontribusinya, sektor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Garut. Selama periode tahun 2015-2020, rata-rata penyerapan angkatan kerja terhadap 1% pertumbuhan PDRB sektor pariwisata sebanyak 1.452 orang. Dengan adanya investasi di sektor pariwisata, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi pada menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut.

Pemerintah diharapkan mengoptimalkan peranan investasi dengan cara meyakinkan para investor dengan melakukan promosi tentang potensi daerah dan memberikan kepastian hukum serta keamanan sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut, terutama di sektor pariwisata, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan desa wisata karena disamping tidak terlalu besar investasi yang dibutuhkan juga dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

- **Investasi pada Sektor Pariwisata**

Pada Tabel 16 dan 17, dapat ditunjukkan bahwa nilai ICOR Kabupaten Garut cenderung Meningkat dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan ICOR Jawa Barat

di periode yang sama (2015-2018). Hal ini dapat diartikan bahwa ada indikasi inefisiensi dari penggunaan capital di Kabupaten Garut. Hal yang cukup menarik untuk diamati dari tabel diatas adalah nilai ICOR Kabupaten Garut adalah negative dan cukup besar. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, ada pengeluaran investasi (PMTB), sementara terjadi pertumbuhan negatif PDRB pada tahun 2020. Ini berarti investasi yang dilakukan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya tidak meningkatkan output tetapi justru menurunkan output. Hal ini membawa implikasi bahwa penurunan PDRB seakan-akan disebabkan oleh peningkatan capital. Padahal kenyataannya, penurunan PDRB Kabupaten Garut tahun 2020 adalah karena kasus pandemic corona, yang hal ini juga terjadi di daerah lain seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia.

Pertanyaannya adalah kemana dampak pengeluaran PMTB? Asumsi dari teori Harrod-Domar secara implisit adalah bahwa pengeluaran investasi tahunan akan terakumulasi dalam bentuk capital, atau barang modal. Secara konsep karakter dari barang modal pada dasarnya tidak serta merta atau secara otomatis menghasilkan output manakala barang modal tersebut tidak dioperasikan. Sementara, barang modal selalu membutuhkan perawatan dan biaya operasional minimum meskipun tidak dioperasikan. Oleh karena itu, secara

konsep ICOR bias bernilai negatif bila mengalami *under utilized*. *Under utilized of capital* sangat mungkin terjadi pada

beberapa sector, terutama sector yang bersifat *heavy capital*.

Tabel 16. ICOR agregat kabupaten Garut 2015-2020

Tahun	PMTB	PDRB	ΔPDRB	icor_ L0	icor_ L1	icor_ L2
2014	8200466	30541631				
2015	8516385	31919057	1377426	6,182826		
2016	9001951	33803539	1884482	4,78		
2017	9445061	35464912	1661373	5,69	5,42	
2018	9968379	37225155	1760243	5,66	5,37	5,11
2019	10451638	39092492	1867337	5,60	5,34	5,06
2020	9622516	38598145	-494347	-19,47	-21,14	-20,16
Rata-rata (2019)				5,58		

Sumber BPS Kabupaten Garut, diolah

Tabel 17. Perbandingan ICOR Jawa Barat dan Kabupaten garut

Tahun	ICOR Jawa Barat	ICOR Garut
2015	5,16	6,18
2016	4,58	4,78
2017	4,88	5,69
2018	4,65	5,66

Sumber, Wikantioso, (2020). *Evaluasi Dan Strategi Menarik Investasi Di Kabupaten Garut: Analisis Incremental Capital Output Ratio Dan Swot*. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol 17 No.1 1-15

Kebutuhan investasi selama periode 2021-2024 dihitung berdasarkan angka ICOR dengan metode standar untuk periode 2015-2019 dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB (lihat Tabel). Target pertumbuhan ekonomi yang digunakan diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Garut, hasil proyeksi berdasarkan data pada periode sebelumnya, serta informasi dari instansi terkait. Hasil penghitungan kebutuhan investasi berdasarkan target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut.

Tabel 18. ICOR Rata-rata kabupaten Garut 2015-2020

Lag	Tahun						Rata-Rata 2019
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Lag 0	6,18	4,78	5,69	5,66	5,60	-19,47	5,58

Sumber BPS Kabupaten Garut, diolah

Pada Tabel 18 diatas, nilai ICOR rata-rata s/d 2019 adalah sebesar 5,58 untuk L0. Studi ini akan menggunakan ICOR rata-rata s/d 2019. Dengan demikian ICOR rata-rata adalah sebesar 5,58. Dengan nilai ICOR rata-rata

didas, maka selanjutnya dapat ditentukan berapa kebutuhan PMTB di masa mendatang untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan.

Tabel 19. Kebutuhan Investasi dan Target Minimal Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut, 2021-2024

Tahun	target pertumbuhan (persen)	PDRB konstan(juta)	ΔY (juta)	kebutuhan investasi	persentase investasi terhadap PDRB
2021	4	60364725	2321720	12955198	21
2022	5	63382961	3018236	16841757	27
2023	5	66583801	3200840	17860687	27
2024	5	70059475	3475674	19394261	28

Sumber BPS Kabupaten Garut, diolah

Selama periode 2015-2019, koefisien ICOR Kabupaten Garut sebesar 5,58. Target minimal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2021 sebesar 4 persen. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi sebesar 60,36 triliun rupiah. Pada tahun 2022, dengan target minimal pertumbuhan ekonomi 5 persen, diperlukan investasi sebesar 63,38 triliun rupiah. Pada tahun 2023 untuk target pertumbuhan 5 persen dan diperlukan investasi sebesar 66,58 triliun rupiah. Pada tahun 2024 untuk target pertumbuhan 5 persen dan diperlukan investasi sebesar 70,05 triliun rupiah.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, karena anggaran pemerintah Kabupaten relatif terbatas. Oleh karena itu, pihak swasta dan rumah tangga diharapkan turut berperan dalam penanaman modal di wilayah Kabupaten Garut. Untuk investasi swasta baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tantangan utama investasi di Kabupaten Garut pada umumnya adalah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Hasil dari penghitungan nilai ICOR Kabupaten Garut juga masih tinggi, hal tersebut menunjukkan investasi di wilayah tersebut belum efisien. Perlu dirumuskan paket kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di Kabupaten Garut, seperti menurunkan lama proses mengurus perijinan dan mengurangi

biaya transaksi. Lebih lanjut perlu dilakukan analisis secara geografis, agar dapat dilakukan penyesuaian kebijakan antara sektoral dan kewilayahan. (ISSN: 2337-3067, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9.2 (2020):161-180)

- **Analisis Strategi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan investasi sektor pariwisata**

Analisis SWOT dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor strategis internal maupun eksternal. Identifikasi tersebut didasarkan pada pembahasan dan kajian terhadap jawaban kuesioner responden observasi terhadap dokumen terkait Kabupaten Garut serta perkembangan kabar terkini.

Dari dasar tersebut maka dalam penelitian ini telah teridentifikasi 22 (dua puluh dua) faktor internal strategis dan 10 (sepuluh) faktor eksternal strategis. Faktor strategis internal dan eksternal tersebut secara bersama-sama akan menentukan posisi dan strategi apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Garut.

Berikut merupakan Tabel 20 analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mendorong dan menghambat sektor pariwisata di Kabupaten Garut.

Tabel 20 Analisis Strengths, Weakness, Opportunites dan Threats

Kekuatan/Strengths	Kelemahan/Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dalam menyusun program pembangunan daerah, dengan menciptakan prioritas pembangunan daerah di sektor pariwisata untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. 2. Dukungan dengan adanya kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang terdiri dar 4 KSPK 3. Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya peninggalan sejarah. 4. Letak geografis yang strategis. 5. Sarana dan prasarana telah memiliki usaha jasa dan sarana wisata yang menunjang kegiatan pariwisata dan telah tersedianya pusat informasi pariwisata bagi wisatawan. 6. Ketersediaan saran teknologi informasi untuk promosi pariwisata Kabupaten Garut. (Website Visit Garut visitgarut.garutkab.go.id) 7. Kemudahan pelayanan perijinan investasi dan peningkatan kualitas pengendalian investasi. 8. Garut memiliki ketenaran yang mudah dikenal dengan ciri khasnya. Kekuatan nama baik ini dapat menjadi modal dasar menarik investasi. (keindahan alam, kelezatan kuliner, sektor peternakan, kesuburan SDA). 9. Sektor pariwisata Kabupaten Garut merupakan sektor basis yang lebih cepat tumbuh dan prima dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat. 10. Garut memiliki Sekolah Pariwisata baik SMK maupun Perguruan Tinggi. 11. Garut mempunyai Sijaring Lapang (Sistem Penjaringan, Pelatihan, Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja serta Penyebarluasan Kesempatan Kerja melalui program kerja sementara sistem padat karya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan pemeliharaan objek wisata belum ditangani secara optimal. 2. Belum optimalnya pengelolaan jasa dan sarana penunjang pariwisata. 3. Promosi pariwisata dan kebudayaan belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kebudayaan, pariwisata baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata. 4. Pola pikir, peran serta dan pemahaman masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan yang profesional. 5. Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan kebudayaan masih kurang dan belum memadai. 6. Aksesibilitas menuju tempat wisata kurang memadai. 7. Belum meratanya pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi antar wilayah. 8. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan asli daerah. 9. Masih banyak Angkatan kerja yang belum terserap. (Masih banyak pengangguran ditunjukkan dengan Angka TPT masih di bawah rata-rata provinsi). 10. Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi karena belum tersedianya rencana detil tata ruang (RDTR) yang telah memiliki aspek legal. 11. Hasil dari perhitungan ICOR Penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/ tidak efisien.
Peluang/Opportunitiess	Ancaman/Threats
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan tersedianya akses menuju Garut (Tol Cigatas, Reaktifasi Kereta Cibatu-Garut-Cikajang, Pembukaan jalan baru menuju Garut, Pembukaan Bandara Tasikmalaya). 2. Tingginya minat investor dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata. 3. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yaitu masuk dalam daftar daerah prioritas percepatan investasi nasional dan investasi menjadi urusan wajib pemerintahan. 4. Potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang menginginkan suasana wisata yang beragam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garut adalah wilayah yang rawan ancaman bencana alam. 2. Kemajuan pembangunan daerah tetangga Kab.Garut misalnya Kabupaten/Kota Bandung atau Kabupaten Purwakarta berpotensi menyebabkan investor tidak berminat menanamkan modalnya di Garut. 3. Persaingan pelaku usaha pariwisata dari daerah lain. (Seniman, UMKM) 4. Masuknya budaya asing yang berpengaruh terhadap budaya lokal garut. 5. Pandemi Covid 19 yang menyebabkan turunnya kunjungan wisata. 6. Sumber daya manusia produktif mencari kerja keluar Kabupaten Garut.

Sumber: hasil analisis Penelitian

Setelah didapatkan faktor internal (Strengts dan Weakness) dan faktor eksternal (Opportunities dan Threats), tahap selanjutnya adalah melaksanakan analisis faktor internal (KAFI) dan analisis faktor eksternal (KAFE). Pemberian bobot dan rating pada Tabel matriks KAFE dan KAFI dilakukan peneliti dengan mengirimkan kuesioner kepada beberapa

responden yang terdiri dari Pegawai Bappeda, Penduduk Garut, dan Orang yang pernah berwisata ke Garut serta peneliti yang telah mempelajari dokumen-dokumen terkait Kabupaten Garut. Pemberian bobot dilakukan dengan cara melihat setiap faktor yang mana mempengaruhi perkembangan pariwisata dalam penanggulangan kemiskinan. Penentuan

posisi tersebut dimaksudkan agar dapat menentukan strategi apa yang dapat diterapkan di Kabupaten Garut.

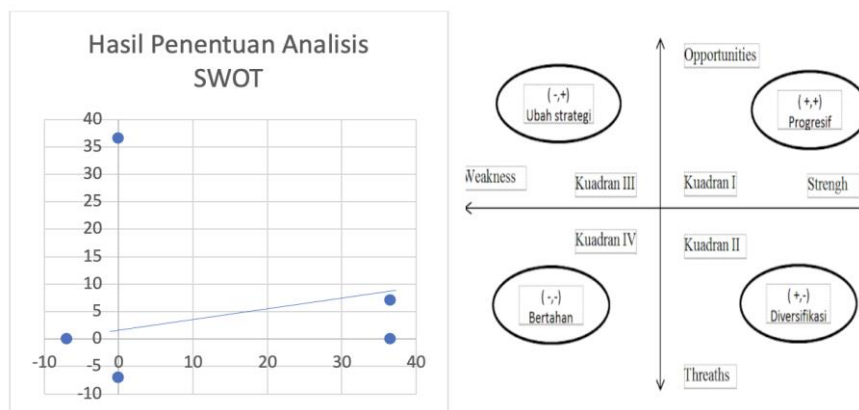
Tabel 21. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
Kekuatan				
1	Komitmen pimpinan dalam menyusun program pembangunan daerah, dengan menciptakan prioritas pembangunan daerah di sektor pariwisata untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.C5:C15	8	4	32
2	Dukungan dengan adanya kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang terdiri dar 4 KSPK (Garut Selatan, Garut Tengah, Garut Utara Dan Perkotaan Garut) dan 7 KPPK (Kawasan Pariwisata Heritage, Situs Garut Kota-Tarogong Kaler-Tarogong Kidul Dan Sekitarnya, Kawasan Budaya Cibatuh Dan Sekitarnya, Kawasan Ekowisata Naracak Valley-Perkebunan Dayeuhmanggung Dan Sekitarnya, Kawasan Ekowisata Samarang, Talegong, Kawasan Pariwisata Kriya Bambu Selawi Dan Pandawa).	4	3	12
3	Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya peninggalan sejarah.	5	4	20
4	Letak geografis yang strategis.	4	3	12
5	Sarana dan prasarana telah memiliki usaha jasa dan sarana wisata yang menunjang kegiatan pariwisata dan telah tersedianya pusat informasi pariwisata bagi wisatawan.	3	3	9
6	Ketersediaan saran teknologi informasi untuk promosi pariwisata Kabupaten Garut. (Website Visit Garut visitgarut.garutkab.go.id)	5	3	15
7	Kemudahan pelayanan perijinan investasi dan peningkatan kualitas pengendalian investasi.	7	3	21
8	Garut memiliki ketenaran yang mudah dikenal dengan ciri khasnya. Kekuatan nama baik ini dapat menjadi modal dasar menarik investasi. (keindahan alam, kelezatan kuliner, sektor peternakan, kesuburan SDA).	5	3	15
9	Sektor pariwisata Kabupaten Garut merupakan sektor basis yang lebih cepat tumbuh dan prima dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat.	4	3	12
10	Garut memiliki Sekolah Pariwisata baik SMK maupun Perguruan Tinggi.	7	3	21
11	Garut mempunyai Sijaring Lapang (Sistem Penjaringan, Pelatihan, Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja serta Penyebarluasan Kesempatan Kerja melalui program kerja sementara sistem padat karya.	8	3	24
Total				193
Kelemahan				
1	Penataan dan pemeliharaan objek wisata belum ditangani secara optimal.	5	3	15
2	Belum optimalnya pengelolaan jasa dan sarana penunjang pariwisata.	4	3	12
3	Promosi pariwisata dan kebudayaan belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kebudayaan, pariwisata baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata.	5	3	15
4	Pola pikir, peran serta dan pemahaman masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan yang profesional.	2	3	6

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
5	Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan kebudayaan masih kurang dan belum memadai.	5	3	15
6	Aksesibilitas menuju tempat wisata kurang memadai.	2	3	6
7	Belum meratanya pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi antar wilayah.	2	3	6
8	Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan asli daerah.	4	3	12
9	Masih banyak Angkatan kerja yang belum terserap. (Masih banyak pengangguran ditunjukkan dengan Angka TPT masih di bawah rata-rata provinsi)	4	3	12
10	Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi karena belum tersedianya rencana detil tata ruang (RDTR) yang telah memiliki aspek legal.	3	3	9
11	Hasil dari perhitungan ICOR Penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/ tidak efisien.	4	3	12
Total		100		120

Pada saat melakukan identifikasi, angka bobot antara faktor internal (S dan W) jumlahnya harus 100 begitu juga dengan faktor eksternal (O dan P). Tahap berikutnya adalah melaksanakan perhitungan bobot dan rating poin unsur serta jumlah sempurna perkalian skor antara bobot dan rating (Total = a x b) pada tiap-tiap unsur S-W-O-T. selanjutnya, ditentukan nilai X dan Y. Nilai X didapatkan dari nilai total (S-W)/2 untuk yang faktor internal.

Untuk nilai Y adalah faktor eksternal yang dihitung dengan rumus (O-P)/2. Selain melihat scoring dari setiap kategori, pada analisis SWOT juga melihat analisis terhadap Lingkungan Eksternal dan Internal dari organisasi, sehingga kita bisa menilai dimana kita berada dan menentukan strategi yang tepat bagi organisasi ke depan. Adapun untuk melihat posisi kita, dapat dilihat melalui kuadran berikut.



Gambar 4. Kuadran Penentuan SWOT

Sumber: Hasil perhitungan

Dari hasil perhitungan X dan Y, diperoleh hasil bahwa X bernilai positif (+) dengan nilai rata-rata sebesar 36,5 dan Y bernilai positif (+) dengan nilai rata-rata 7. Dengan demikian, posisi Kabupaten Garut berada pada kuadran I (+,+) yang artinya Kabupaten Garut memiliki kekuatan internal yang cukup besar dan memiliki kesempatan yang cukup banyak. Rekomendasi Langkah selanjutnya adalah

Progresif, artinya Kondisi Kabupaten Garut dalam kondisi prima dan mantap terutama di sector pariwisata. Sehingga benar-benar dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Rekomendasi Strategi Pengurangan Kemiskinan Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Sektor pariwisata

Setelah selesai dengan perhitungan kuantitatif, maka teknis selanjutnya adalah mengidentifikasi strategi dari hasil analisis kuadran penentuan SWOT dimana strategi yang perlu diperhatikan adalah Progresif yang artinya bagaimana Kekuatan (S) bisa mengoptimalkan Peluang (Opportunities).

Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan Matriks Analisis SWOT diatas adalah Offensive/competitive strategies (SO) Strategi ini merupakan strategi yang bersifat kuat dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan yang dimiliki. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

- Memperkuat komitmen dalam menyusun program pembangunan daerah di sektor pariwisata bisa meningkatkan minat investor dalam membangun dan mengembangkan sarana wisata hal ini bisa mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
- Mengoptimalkan sekolah pariwisata dan Program Sijaring Lapang untuk menarik minat investor karena adanya kemudahan dalam mendapatkan SDM yang berkualitas yang bisa diserap untuk diberdayakan dalam pembangunan dan pengembangan wisata Garut.
- Mempermudah Alur pelayanan perijinan investasi dan peningkatan kualitas pengendalian investasi akan semakin meningkatkan keinginan investor dalam membangun dan mengembangkan sarana wisata
- Melestarikan dan meningkatkan Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya peninggalan sejarah untuk menarik pasar wisatawan domestic maupun mancanegara agar berkunjung ke Kabupaten Garut.
- Mengoptimalkan sarana teknologi informasi sebagai wahana promosi yang dimiliki Garut untuk menarik para investor dan wisatawan.
- Memanfaatkan ketenaran yang dimiliki Kabupaten Garut dengan ciri khasnya (keindahan alam, kelezatan kuliner, dan sebagainya) berpotensi menarik investor dan wisatawan untuk berinvestasi dan berkunjung.

- Memanfaatkan letak yang strategis membuat banyak akses yang akan dibangun menuju Kabupaten Garut.
- Mempertimbangkan sektor pariwisata yang merupakan sector basis yang lebih cepat tumbuh dibandingkan provinsi Jawa Barat untuk berinvestasi di Garut.
- Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang berpotensi menarik para wisatawan.
- Meningkatkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Garut sebagai kebijakan prioritas percepatan investasi nasional

KESIMPULAN DAN SARAN

Sektor pariwisata merupakan sektor basis dan sektor prima yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Garut. Dilihat dari elastisitasnya, sektor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Garut.

Penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata dapat dipercepat dari dukungan investasi di sektor pariwisata. Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Kabupaten Garut perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya investasi di sektor pariwisata, diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang menyerap angkatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi pada menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut.

Beberapa rekomendasi kebijakan strategis dalam pengembangan sektor pariwisata untuk pengurangan angka pengangguran dalam penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada perkuatan komitmen dalam menyusun program pembangunan daerah di sektor pariwisata; optimalisasi sekolah pariwisata dan Program Sijaring Lapang untuk menarik minat investor karena adanya kemudahan dalam mendapatkan SDM yang berkualitas; kemudahan alur pelayanan perijinan investasi dan peningkatan kualitas pengendalian investasi; promosi, pelestarian dan peningkatan keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya peninggalan sejarah untuk menarik pasar wisatawan; optimalisasi sarana

teknologi informasi sebagai wahana promosi; pemanfaatan ketenaran yang dimiliki Kabupaten Garut dengan ciri khasnya; pemanfaatan letak yang strategis membuat banyak akses yang akan dibangun menuju Kabupaten Garut; Pertimbangan sektor pariwisata yang merupakan sektor basis yang lebih cepat tumbuh dibandingkan provinsi Jawa Barat untuk berinvestasi di Garut; pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; peningkatan sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Garut sebagai kebijakan prioritas percepatan investasi nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dikarenakan akses terhadap data yang minim dan waktu penyusunan penelitian yang cukup singkat. Adapun keterbatasan pada analisis penelitian beserta rekomendasi lanjutan yaitu : (1) kelengkapan data sekunder, terutama terkait ketersediaan dan kedalaman data yang belum terlingkup di dalam analisis pada penelitian dan (2) penggunaan analisis SWOT dengan lebih maksimal, yakni penentuan jumlah dan kategori responden. Selain itu, analisis SWOT hanya sampai pada pada pembobotan Tabel KAFI/ KAFI dan penentuan rekomendasi strategi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan analisis Litmus untuk memberikan pandangan prioritas penggunaan strategi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Chowdhury, T., & Somani, S. (2020). Performance Evaluation and Impact of Grameen Bank on Social Development and Women Empowerment in Bangladesh. *International Journal of Social and Administrative Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.18488/journal.136.2020.51.54.73>
- Bendavid-Val, A. (1989). Rural-Urban Linkages: Farming and Farm Households in Regional and Town Economies. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 1(2), 89–97. <https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.1989.tb00015.x>
- Berardi, N., & Marzo, F. (2017). The Elasticity of Poverty with respect to Sectoral Growth in Africa. *Review of Income and Wealth*, 63(1). <https://doi.org/10.1111/roiw.12203>
- Biswas, A., & Singh, K. (2020). Estimating employment elasticity of growth in MSME sector of India. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(1). <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I1/20201035>
- Febrina, Nini. 2015. Persepsi Wisatawan Tentang Daya Tarik Wisata Pemandian Tirta Alami Kabupaten Padang Pariaman. Padang Kabupaten Garut Dalam Angka 2021
- Keputusan Bupati Nomor 556/Kep.963-DPMD Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa-Desa Wisata Rintisan Di Kabupaten Garut
- Mirdad, A. J., & Akhbar, R. T. (2018). Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(1). <https://doi.org/10.31002/rep.v3i1.786>
- Muhammad, R., Mutiarin, D., & Damanik, J. (2021). Virtual Tourism Sebagai Alternatif Wisata Saat Pandemi. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 4(1). <https://doi.org/10.17509/jithor.v4i1.31250>
- Munandar, T. A., Azhari, Musdholifah, A., & Arsyad, L. (2018). Multiview hierarchical agglomerative clustering for identification of development gap and regional potential sector. *Journal of Computer Science*, 14(1). <https://doi.org/10.3844/jcscsp.2018.81.91>
- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Garut Tahun 2019-2025
- Pendit, Nyoman S. (2006). Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita
- Phadernrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance-Performance Analysis based SWOT analysis. *International Journal of Information Management*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.03.009>

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Garut Tahun 2018-2025

Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Republik Indonesia tentang Kepariwisataaan, UU No. 10 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM

Sukmana, Oman. 2018. Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata. *Sosio Informa*, Volume 4 No.03, September-Desember 2018

Taguchi, H., & Lowhachai, S. (2014). A revisit to the incremental capital-output ratio: The case of Asian economies and Thailand. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 7(1). <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.059891>

TNP2K. (2021). Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun 2021.

Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development - 12th Edition*. Pearson Education, Inc.